

Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Dengan Menggunakan Metode *Value For Money*

Indah Permata Sukma

Fakultas Ekonomi / Program Studi S1 Manajemen, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2010631020087@student.unsika.ac.id

Asep Muslihat

Fakultas Ekonomi / Program Studi S1 Manajemen, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: asep.muslihat@staff.unsika.ac.id

Abstract. *This research was conducted to measure and analyze financial performance in the District Health Office. Karawang in the Health Service Provider Program for UKM and UKP Municipal District Authorities. This research is descriptive research with data collection techniques using observation methods, literature studies and documentation. The method of processing and analyzing data uses the value for money method through Government Agency Performance Reports (LKIP) of the District Health Office. Karawang in 2022. The results of the study show that the financial performance of the District Health Office Karawang is very good and has been oriented to the interests of the community and is guided by 3 indicators of value for money, namely economy, efficiency and effectiveness.*

Keyword: *Value for money, Financial performance, public health Office*

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengukur serta menganalisis kinerja keuangan di Dinas Kesehatan Kab. Karawang pada Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan metode *value for money* melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinkes Kab. Karawang tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kab. Karawang sudah sangat baik serta sudah berorientasi pada kepentingan masyarakat dan berpedoman pada 3 indikator *value for money* yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Kata Kunci: *Value for money, Kinerja keuangan, Dinas Kesehatan*

PENDAHULUAN

Dengan diterapkan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan serta hak yang lebih besar untuk mengatur serta mengurus pemerintahan dan kepentingan rakyatnya. Kinerja pemerintah saat ini cukup menarik perhatian masyarakat, karena kesadaran masyarakat terhadap kinerja lembaga sektor publik semakin meningkat. Di era pembangunan ekonomi saat ini, masyarakat kian cerdas dan bijaksana untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas publik dari lembaga pemerintah. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah anggaran yang dikeluarkan untuk program yang dijalankan sama dengan hasil yang mereka dapatkan. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan sudah mulai menurun karena pertanggungjawaban atas informasi keuangan yang dibuat oleh organisasi tersebut tidak transparan. Banyak orang berpikir bahwa lembaga pemerintah adalah tempat dan sumber

penghambur-hamburan dana. Agar dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah yang lebih efektif serta efisien, maka dari itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan handal. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan. Salah satu cara untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik yaitu dengan menggunakan konsep *Value for Money*.

Menurut Mardiasmo (2009), *Value for Money* adalah suatu konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan tiga indikator, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam menyediakan serta mengalokasikan sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam menggunakan sumber daya yang berarti meminimalkan penggunaan dan memaksimalkan hasil, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang merupakan salah satu lembaga pemerintah dibidang kesehatan. lembaga ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya, yang kemudian diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam penggunaan anggaran kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan operasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mempunyai anggaran penghasilan sebagai pemasukan instansi dan anggaran belanja sebagai pengeluaran instansi. Dengan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui apakah anggaran yang dipergunakan untuk setiap kegiatan sudah berjalan dengan baik sesuai target dan tujuan yang telah ditetapkan? Serta bagaimana hasil perhitungan kinerja keuangan melalui metode *value for money* pada Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Dinkes Kab. Karawang? Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dengan Menggunakan Metode *Value for Money*.”

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (2), Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan menurut Mahsun (2017:25), Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi yang

tertuang dalam rencana strategis organisasi. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Handoko, 2016).

Berdasarkan definisi diatas, kinerja keuangan dapat diartikan sebagai hasil evaluasi kegiatan atau program yang menjadi tolak ukur untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengatur anggaran pendapatan dan belanja.

Konsep *Value for Money*

Menurut Mardiasmo (2017), *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Kusufi (2017), penerapan konsep *value for money* maka pemerintah daerah dituntut selalu menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencari dana maupun menggunakan dana. Hal tersebut yang mendorong pemerintah daerah untuk terus memperhatikan setiap nilai rupiah yang didapatkan dan dibelanjakan.

Di bawah ini akan dijelaskan konsep *Value for Money*, atau yang dikenal sebagai 3E.

Ekonomis diartikan sebagai menghemat biaya tanpa mengurangi kualitas.

1. Efisiensi artinya biaya yang digunakan harus lebih rendah dari pendapatan dan pendapatan yang dihasilkan harus lebih tinggi, hal ini yang membuat suatu lembaga sektor publik dianggap efisien.
2. Efektivitas artinya semua kegiatan dan tujuan organisasi sektor publik terwujud secara optimum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Manfaat menerapkan *value for money* di sektor publik adalah:

- 1) Efektivitas pelayanan publik jadi lebih meningkat, yaitu artinya pelayanan yang diberikan sudah sesuai target atau mencapai tujuan.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas output yang dihasilkan dari pelayanan publik.
- 3) Mengurangi biaya pelayanan publik melalui efisiensi yang lebih rendah sehingga menghemat dalam menggunakan input.
- 4) Distribusi pengeluaran lebih difokuskan pada kebaikan bersama.
- 5) Meningkatkan kesadaran keuangan publik sebagai landasan pelaksanaan akuntabilitas publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan data yang terkumpul, dengan cara menyajikan, menganalisis dan menafsirkannya, agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan objektif. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu analisis berdasarkan

perhitungan untuk menentukan tingkat rasio. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinkes Kab. Karawang tahun 2022, yang diperoleh dari website Dinas Kesehatan Kab. Karawang. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Value for Money* yaitu sebuah konsep pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang memberikan indikasi apakah dana yang dikeluarkan sudah memberikan nilai yang spesifik kepada masyarakat. Indikator-indikator tersebut adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Berikut adalah metode analisis data yang digunakan pada setiap indikator menurut Mardiasmo [1]:

1. Pengukuran Ekonomis

Definisi ekonomi mengacu pada pengadaan sumber daya (input) yang harus dibeli dengan harga lebih rendah (pengeluaran lebih sedikit) atau dengan harga yang mendekati harga pasar. Oleh karena itu jika anggaran yang direalisasikan lebih kecil dari target anggaran, maka dapat diasumsikan bahwa hasilnya sudah ekonomis atau telah tercapai, dan hasil tersebut dapat dicapai sesuai yang telah ditetapkan.

$$\text{Rumus: Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran yang digunakan

Nilai input: Dana anggaran yang dianggarkan

Kriteria ekonomi adalah:

- Apabila didapatkan nilai < 100% maka ekonomis;
- Apabila didapatkan nilai = 100% maka ekonomi seimbang;
- Apabila didapatkan nilai > 100% maka tidak ekonomis.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas. Efisiensi adalah perbandingan keluaran yang dihasilkan (output) dengan input (masukan) yang digunakan. Menurut Bastian (2006) semakin besar output yang dihasilkan dibanding input yang digunakan, maka semakin besar tingkat efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Rumus: Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase hasil yang dicapai

Input : Persentase realisasi anggaran yang digunakan

Kriteria dalam pengukuran efisiensi:

- Apabila didapatkan nilai < 100% maka tidak efisien;
- Apabila didapatkan nilai = 100% maka efisien seimbang;
- Apabila didapatkan nilai > 100% maka efisien.

3. Pengukuran Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004) suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pada dasarnya adalah seberapa baik suatu program atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar nilai tingkat efektivitas, maka semakin efektif program atau kegiatan tersebut.

$$\text{Rumus: Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Persentase target yang ingin dicapai

Output : Persentase hasil yang dicapai

Kriteria dalam pengukuran efektivitas:

- Apabila didapatkan nilai < 100% maka tidak efektif;
- Apabila didapatkan nilai = 100% maka efektivitas seimbang;
- Apabila didapatkan nilai > 100% maka efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibawah ini adalah analisis data berdasarkan tiga indikator *Value for Money* di Dinas Kesehatan Kab. Karawang pada Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota:

Pengukuran ekonomis

Ekonomis merupakan hubungan antara input dengan nilai input yang dinyatakan dalam satuan moneter. Berikut ini adalah tabel pengukuran ekonomis:

Tabel 1. Pengukuran Ekonomi Pada Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Output (%)
Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya (dinas kesehatan)	4.270.907.000	3.808.719.250	89,18	97
Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (rumah Sakit khusus paru)	200.000.000	193.500.000	96,57	97
Pembangunan puskesmas	25.100.595.725	21.339.534.802	85,02	100
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit (rumah sakit khusus paru)	500.000.000	499.356.144	99,87	100
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit (rumah sakit umum daerah)	255.071.722	255.071.722	100	100
Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan (dinas kesehatan)	3.200.000.000	3.060.000.000	95,63	100
Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (dinas kesehatan)	3.514.371.850	3.192.520.337	90,84	100
Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan (rumah sakit khusus paru)	8.666.213.223	8.570.142.188	98,89	100
Pengadaan obat, vaksin (dinas kesehatan)	8.538.542.952	8.133.185.809	95,25	100
Pengadaan obat vaksin (rumah sakit khusus paru)	633.786.777	582.640.163	91,9	100
Pengadaan bahan habis pakai (dinas kesehatan)	4.610.119.528	4.604.394.200	99,88	100
TOTAL	59.489.608.777	54.239.064.615	94,84	99,45

Tabel 1. menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Dinkes Kab. Karawang untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 54.239.064.615 atau sebesar 94,84% dengan capaian anggaran terkecil pada kegiatan Pembangunan Puskesmas yaitu sebesar 85,02%.

Dinas Kesehatan Kab. Karawang telah menghemat biaya dan mengurangi dana yang digunakan untuk program ini sebanyak Rp. 5.250.544.162. Dengan capaian anggaran <100%, namun output yang dihasilkan mampu mencapai 99,45%. Maka kinerja Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota tahun 2022

dapat dikatakan telah berjalan secara ekonomis, karena realisasi anggaran yang digunakan lebih rendah daripada anggaran yang telah ditetapkan maka kegiatan tersebut mampu menghemat atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan dan tidak ada pemborosan.

Pengukuran Efisiensi

Pada penelitian ini nilai input dan output berasal dari data pencapaian realisasi keuangan yang terdapat pada LKIP Dinas Kesehatan Kab.Karawang tahun 2022. Nilai input diperoleh dari persentase dana anggaran yang dibelanjakan untuk menghasilkan output, dan nilai output diperoleh dari persentase penyelesaian setiap kegiatan.

Tabel 2. Pengukuran Efisien Pada Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan	Capaian (%)	Output (%)	Efisiensi (%)
Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya (dinas kesehatan)	89,18	97	108,77
Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (rumah Sakit khusus paru)	96,57	97	100,26
Pembangunan puskesmas	85,02	100	117,62
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit (rumah sakit khusus paru)	99,87	100	100,23
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit (rumah sakit umum daerah)	100	100	100
Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan (dinas kesehatan)	95,63	100	104,58
Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (dinas kesehatan)	90,84	100	110,08
Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan (rumah sakit khusus paru)	98,89	100	101,12
Pengadaan obat, vaksin (dinas kesehatan)	95,25	100	104,98
Pengadaan obat vaksin (rumah sakit khusus paru)	91,9	100	108,78
Pengadaan bahan habis pakai (dinas kesehatan)	99,88	100	100,12
TOTAL	94,84	99,45	105,13

Tabel 2. memperlihatkan bahwa seluruh kegiatan pada Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota dapat menyelesaikan kegiatan secara efisien sehingga mencapai rata-rata rasio efisien sebesar 105,13%. Hal ini yang membuat Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah

Kabupaten Kota dapat dikatakan efisien. Nilai efisiensi terendah terdapat pada kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dengan rasio sebesar 100%, sedangkan rasio efisiensi tertinggi terdapat pada kegiatan Pembangunan Puskesmas dengan rasio sebesar 117,62%. Rasio efisiensi >100% mampu menghasilkan output maksimum pada semua kegiatan.

Pengukuran Efektivitas

Pada pengukuran efektivitas ini, nilai outcome didapat dari data LKIP Dinas Kesehatan Kab. Karawang, sedangkan nilai output berasal dari pencapaian realisasi anggaran keuangan.

Tabel 3. Pengukuran Efektivitas Pada Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan	Outcome (%)	Output (%)	Efektivitas (%)
Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya (dinas kesehatan)	97	97	100
Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (rumah Sakit khusus paru)	97	97	100
Pembangunan puskesmas	100	100	100
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit (rumah sakit khusus paru)	100	100	100
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit (rumah sakit umum daerah)	100	100	100
Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan (dinas kesehatan)	100	100	100
Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (dinas kesehatan)	100	100	100
Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan (rumah sakit khusus paru)	100	100	100
Pengadaan obat, vaksin (dinas kesehatan)	100	100	100
Pengadaan obat vaksin (rumah sakit khusus paru)	100	100	100
Pengadaan bahan habis pakai (dinas kesehatan)	100	100	100
TOTAL	99,45	99,45	100

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas pada tabel 3 program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota sudah sangat efektif. Dapat dilihat dari rasio efektivitas yang mencapai 100%, itu artinya seluruh kegiatan pada program ini telah mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Dinas Kesehatan Kab. Karawang tidak hanya mementingkan “yang penting kegiatan sudah terlaksana” atau “penyerapan

anggaran sudah terealisasi 100%”, namun Dinkes Kab. Karawang telah memfokuskan pada hasil (outcome) yang harus diperoleh dari kegiatan yang dijalankan dan telah memberi pertanggungjawaban bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dari program tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menggunakan metode value for money menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kab. Karawang tahun 2022 telah menjalankan Program Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota secara ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan pengukuran ekonomi, Dinas Kesehatan Kab. Karawang telah menghemat biaya dan mengurangi dana yang digunakan untuk program ini sebanyak Rp. 5.250.544.162. Dengan capaian anggaran <100%, namun output yang dihasilkan mampu mencapai 99,45% atau hampir mencapai target. Berdasarkan pengukuran efisiensi, Dinas Kesehatan Kab. Karawang dapat menyelesaikan kegiatan secara efisien sehingga mencapai rata-rata rasio efisien sebesar 105,13%. Sedangkan berdasarkan pengukuran efektivitas dapat dikatakan sudah sangat efektif, maka semua kegiatan pada program ini telah mencapai tujuan yang sudah ditargetkan dan sudah berfokus pada hasil yang harus dicapai.

Oleh karena itu, anggaran yang diberikan pemerintah pusat sudah digunakan dan dikelola dengan baik. Sehingga kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kab. Karawang menggunakan metode *value for money* sudah berjalan dengan baik dan selalu fokus pada kemaslahatan masyarakat.

Saran

Hasil yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kab. Karawang tahun 2022 tentunya perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya, tidak hanya merespon tuntutan regulasi yang ditetapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dinas kesehatan kabupaten Karawang atas kinerja keuangannya, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk menghadapi segala kendala dan tantangan. Dengan adanya penilaian kinerja keuangan ini, diharapkan Dinas Kesehatan Kab. Karawang lebih memperhatikan setiap program yang dilaksanakan, untuk mengidentifikasi kekurangan pelayanan kesehatan Puskesmas yang ada dan apa yang masih dibutuhkan. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah lain dan mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. I. Pratiwi and E. Nursandia, *Analisis Pengukuran Kinerja Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blitar*, pp. 10-20, 2017.
- G. T. Wuwungan, Jantje Tinangon and Sintje Rondonuwu, *Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado*, *Jurnal Riset Akuntansi*, pp. 354-361.
- G. Y. N. Sari, *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru*, *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, pp. 56-65, 2022.
- Halim dan Kusufi, in *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran*, Jakarta, Salemba Empat, 2017.
- I. Bastian, dalam *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, Yogyakarta, BPF, 2006.
- "LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)," Karawang, 2020, pp. 1-128.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Mardiasmo, in *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, ANDI, 2017, p. 4.
- Mardiasmo, in *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, BPF, 2004, p. 124.
- "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH," 2006. [Online]. Available: https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_08_06.pdf.